



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 26  
TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2020 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali dan mengganti Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :** PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI 2020-2024.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024 diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH;
  - c. BAB III: AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

d. BAB IV: MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI DI KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 2023  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

THAMRIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 21 TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 Juni 2023

## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020-2024

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing perangkat daerah.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum

sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan perubahan *Road Map* yang

tertuang pada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024. *Road Map* Kabupaten Lampung Selatan ini disusun untuk mendukung pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam dua sasaran strategis Reformasi Birokrasi yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

## 1.2. Tujuan Penajaman *Road Map* RB

Pada hakikatnya, penajaman tujuan dan sasaran dilakukan agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan nasional serta mampu menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia. Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab beberapa isu diantaranya : (1) menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional serta mampu berdaya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, (2) penguatan upaya pencegahan korupsi, serta (3) peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.

Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta ASN yang lebih profesional.

Tujuan penajaman : Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

#### 2.1. KONDISI EKSISTING SESUAI DENGAN PERUBAHAN ROAD MAP RB 2020-2024

Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan walaupun dengan nilai Cukup. Hal ini berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 55,53 masuk kategori CC (Cukup Memadai). Hasil tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Namun demikian dengan perubahan atau penajaman *road map* RB nasional maka pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu memetakan kondisi eksisting pelaksanaan RB sampai dengan tahun 2022 berdasarkan tujuan sasaran dan indikator-indikator serta kegiatan utama level mikro yang diamanahkan oleh *road map* tersebut.

Adapun mapping atau pemetaan tersebut sebagai berikut:

#### A. TUJUAN RB

N O	TUJUAN RB 2020-2024	INDIKATOR TUJUAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	25,79% Kab/Kota Minimal Baik	70% Kabupaten/Kota minimal Baik	BB (73,00)	CC (55,53)
		Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan: 9,71	Menurun dari angka 9,71	12,00	13,14
		Peningkatan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi 9,0%	Meningkat dari angka 9,0 %	10	10
			Realisasi Penanaman Modal 901,0	Meningkat dari angka 901,0		1,807
		Pengendalian Tingkat Inflasi	1,87	2,8	5,00	5,52
		Penggunaan Produk Dalam Negeri	45	55	45,15	39,30
		Digitalisasi AP (Penanganan Stunting)	24,4	14	5	9,9

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024 dan LKjIP Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

Dari tabel diatas ada empat indikator tujuan yang telah masuk didalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Penduduk Kemiskinan, Peningkatan Investasi Penanaman Modal dan Laju Tingkat Inflasi Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 masih kurang karena tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu masuk kategori Cukup pada nilai 55,53.

Untuk angka kemiskinan capaian Kabupaten Lampung Selatan masih diangka yang lebih rendah dari target nasional yaitu capaian nasional di angka 9,71 sedangkan angka kemiskinan kabupaten Lampung Selatan di angka 13,14. Sedangkan Realisasi Penanaman Modal/Investasi masih



dibawah capaian nasional (1,807 trilyun rupiah) dan target nasional (diatas nilai 901 trilyun rupiah) yaitu 2,1 trilyun rupiah.

## B. SASARAN RB

NO	SASARAN RB 2020-2024	INDIKATOR SASARAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Kab/Kota:23,58 % Baik	50% Kab/Kota Baik	3	1,70
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kab/Kota: 66,73% Baik	100% Kab/Kota Minimal Baik	BB (70,40)	B (65,80)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kab/Kota: 91,91%	Pemerintah Daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut	WTP	WTP
	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional	Nilai Survei Employer Branding	6,90	7,66	Na	Na
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,90	67,14	Na	Na
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Kab/Kota: 71,4	Meningkat dari angka 71,4	80	71,68
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kab/Kota: 74,89	Meningkat dari angka 74,89	90,15	86,56

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024 ,LKjIP Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, LHE RB 2022 & Hasil Survey ASN BerAKHLAK

Dari beberapa indikator sasaran RB ada 3 indikator sasaran yang belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 yaitu Nilai Survei *Employer Branding*, Nilai Survei ASN BerAKHLAK dan Nilai Survei Penilaian Integritas. Jika dilihat secara garis besar bahwa capaian indikator sasaran RB Kabupaten Lampung Selatan belum semua memenuhi target nasional. Namun dari Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Selatan mengevaluasi capaian tersebut dalam pelaksanaan penajaman RB level mikro di Kabupaten Lampung Selatan.

## C. KEGIATAN UTAMA

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	25

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,70
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	NA
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	22,35
		Nilai SAKIP	65,80
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	NA
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	55,31
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	71,68
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	NA
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	NA
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	18,21
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,2
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	39,30
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	85,76
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	40
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	30
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	95
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	NA
		Employeer Branding*	NA

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,56
		Indeks Pelayanan Publik	4,08
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	73,49

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024, LKjIP Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, LHE RB 2022 & Hasil Survey ASN BerAKHLAK

Dari 21 kegiatan utama dan 27 indikator kegiatan utama ada 7 indikator yang belum tersedia data nilai atau angka realisasinya (*Not Available/NA*). Belum tersedianya data disebabkan karena indikator baru atau indikator tersebut masih perlu dibahas/dikonfirmasi dengan Kementerian/Lembaga level Meso.

## BAB III

### AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Didalamnya memuat tujuan dan sasaran RB beserta indikator-indikatornya serta penentuan kegiatan utama level mikro untuk RB General dan penentuan RB Tematik yang diselaraskan dengan rencana jangka menengah (RPJMD/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* RB mendapatkan alokasi pembiayaan.

#### 3.1. Tujuan Sasaran Reformasi Birokrasi

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis Reformasi Birokrasi tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan Reformasi Birokrasi, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta keteringgalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah "Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan Reformasi Birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Adapun Tujuan sasaran RB Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tujuan dan Sasaran RB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Tujuan: Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel
	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional

### 3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Dalam Reformasi Birokrasi general terdapat kegiatan-kegiatan utama yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian perlu adanya penetapan prioritas Kegiatan Utama yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2026 yang menyesuaikan perencanaan dan ketersediaan anggaran daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi penetapan prioritas Kegiatan Utama ada beberapa Kegiatan Utama yang sudah masuk dalam dokumen perencanaan strategis baik di RPJMD dan Renstra. Akan tetapi karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan *mandatory* dari *road map* RB nasional maka kegiatan-kegiatan tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2026 dengan target capaian kinerja pada tahun 2024 sesuai dengan yang dicantumkan pada *road map* nasional.

Sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi *Republik* Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat 21 Kegiatan Utama pada level Mikro dan bersifat *mandatory* bersifat wajib seluruhnya dan lebih prioritas dibandingkan kegiatan utama inisiatif di Kabupaten.

Dari 21 kegiatan utama tersebut dilakukan identifikasi, untuk menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	5	7	22
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	8	8	26
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	5	9	24

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	6	5	21
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	8	8	26
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	9	10	29
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	7	7	24
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	8	7	25
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	8	9	27
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	10	5	25
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	10	5	25
12	Pelaksanaan Arsip Digital	10	10	5	25
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	5	10	25
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	5	10	25
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	10	10	30
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	10	10	30
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	5	10	25
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	10	10	30
19	Penguatan Sistem Merit	10	5	10	25
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	10	10	30
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	5	10	25

Berdasarkan hasil identifikasi diatas terdapat delapan Kegiatan Utama yang diprioritaskan terlaksana pada tahun 2023 karena memperoleh nilai maksimal untuk mandat nasional, implementasi rendah serta mendesak untuk dilaksanakan. Delapan Kegiatan Utama tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
- c. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
- d. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja;
- e. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik;
- f. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral;

- g. Penguatan Sistem Merit;  
h. Pelaksanaan *Core Values* ASN.

Namun demikian selain dari kegiatan prioritas diatas kegiatan utama yang lain tetap masuk dalam rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023-2026, dengan tetap mempertimbangkan beberapa faktor yang salah satunya adalah dukungan anggaran yang ada pada tahun-tahun tersebut. Adapun rencana pelaksanaan RB General Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Rencana Pelaksanaan RB General Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023-2026

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baselin	Target					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2022	2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana	
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi Setdakb. LS	Seluru PD
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Persen	25	75	100	100	100	100	Bagian Organisasi Setdakb. LS	Seluru PD
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Nilai	1,70	2,2	3	3,5	3,5	3,5	Dinas Kominfo	Seluru PD
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	Persen	Na	0	0	0	0	0	Dinas Kominfo	Seluru PD
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	22,35	22,83	23,31	23,89	24,47	24,47	Bappeda	Seluru PD
	Nilai SAKIP	Nilai	65,8	68,7	70,00	70,30	70,50	70,50	Inspektoral, Bappeda, Bagian Organisasi	Seluru PD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	Persen	Na	0	0	0	0	0	DPMPPT SP	Unit Pelayanan Publik
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Nilai	0	2	2	2	2	2	Inspektoral	Unit Pelayanan Publik
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	3	3	3	Inspektoral	Seluru PD
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Persen	55,31	60,15	60,50	70,21	70,65	70,65	Dinas Kominfo	Seluru PD
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	71,68	75	80	85	90	90	Inspektoral	Seluru PD
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	Na	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Bagian Hukum	Seluru PD
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Na	50,7	50,75	60	60,13	60,13	Bagian Hukum	Seluru PD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baselin	Target					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2022	2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana	
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	18,21	25,25	50,25	75,25	75,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluru PD	
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	1,2	1,8	2,0	2,2	2,4	Dinas Kominfo	Seluru PD	
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	39,3	60,25	85,25	85,75	85,95	Bagian PBJ	Seluru PD	
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Predikament	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluru PD	
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persen	85,76	85	90	95	95	Inspektoral	Seluru PD	
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Persen	100	100	100	100	100	BKD	Seluru PD	
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta ASN	Persen	40	50	60	70	80	BKD	Seluru PD	
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja	Persen	30	50	70	80	90	BKD	Seluru PD	
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Nilai	95	150	230	260	275	BKD	Seluru PD	
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	Nilai	Na	Na	Na	Na	Na	Bagian Organisasi Setdakb. LS	Seluru PD	
	Employeer Branding*	Nilai	Na	Na	Na	Na	Na	Bagian Organisasi Setdakb. LS	Seluru PD	
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	86,56	88,37	90,02	90,25	90,50	Bagian Organisasi Setdakb. LS	Unit Pelayanan Publik	
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,08	4,50	4,75	4,85	5,25	Bagian Organisasi Setdakb. LS	Unit Pelayanan Publik	
	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai	73,49	78,90	85	92	95	Bagian Organisasi Setdakb. LS	Unit Pelayanan Publik	

### 3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.



Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik. Tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*).

Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan kondisi eksisting, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, keparahan masalah, dampak kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah maka ada dua tema yang dipilih untuk dimasukkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Lampung Selatan, yaitu tema tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Angka Stunting), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi. Adapun rincian hasil identifikasi penentuan tema sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Mandat RB Tematik Nasional	Kondisi Eksisting	Target	Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah (Implementasi Rendah)	Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi Yang Dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
Skala 1-10 (1=sangat tidak sesuai .... 10=sangat sesuai)								
Pengentasan Kemiskinan	13,14	13	12,5	10	10	10	5	47,5
Peningkatan Investasi	10	10	10	5	10	10	8	43
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Angka Stunting)	9,9	9,9	3	5	5	10	5	28
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	39,30	39,30	4	5	5	10	5	29
Pengendalian Inflasi	5,52	5,52	3	5	8	10	5	31

#### A. pengentasan kemiskinan

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhankebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada Tahun 2021 sebesar 439.421,- meningkat dari Tahun 2020 sebesar 422.328,-. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pada Tahun 2019, jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 144.440 jiwa, mengalami penurunan hingga pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin menjadi 143.330 jiwa. Namun pada Tahun 2021 adalah sebesar 14,31 persen.

Tahun 2020 jumlah penduduk miskin menjadi 143.330 jiwa atau turun menjadi 14,08 persen.

Pada Tahun 2021, Lampung Selatan berada di urutan ke-5 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Lampung Selatan memiliki persentase 14,19 persen bahkan lebih tinggi dari persentase Provinsi Lampung yang hanya 12,62 persen. Peramalan persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2023 berada pada rentang 13,66 -14,18 persen.

#### B. Peningkatan Investasi

Penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Jumlah investor PMDN dan PMA selama lima tahun terakhir di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2017 jumlah investor berskala nasional berjumlah 793 yang terdiri dari 783 PMDN dan 10 PMA. Data tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga Tahun 2021 yang telah mencapai 1.873 investor berskala nasional, namun di Tahun 2021 ini tidak terdapat investor PMA.

Jumlah nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2017-2021 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat hingga Tahun 2021 nilai investasi PMDN dan PMA telah mencapai 41.153 miliar rupiah yang terdiri dari 41.139 miliar investasi PMDN dan 13 miliar investasi PMA.

#### C. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Angka Stunting)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang termasuk dalam lokus program percepatan penurunan stunting. Berdasarkan data yang telah dihimpun bahwa Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2013 kasus stunting mencapai 34% kemudian turun menjadi 33% di tahun 2018 namun lokus kejadian di Kecamatan dan Desa bertambah. Atas kondisi tersebut, pada tahun 2019 Bupati Lampung Selatan mengeluarkan strategi Percepatan penurunan stunting melalui Gerakan Swasembada Gizi dan strategi ini terbukti berhasil sehingga di tahun 2022 angka prevalensi stunting Lampung Selatan adalah 9,9% berdasarkan data SSGI Tahun 2021. Capaian ini jauh dibawah target nasional yang ditetapkan Presiden Jokowi pada tahun 2024 sebesar 14 persen. masih belum optimalnya pendampingan yang dilakukan TPK terhadap keluarga sasaran beresiko stunting dapat menghambat percepatan penurunan stunting. sehingga pada tahun 2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya mengatur strategi agar pendampingan yang dilakukan oleh kader adapt optimal yang kemudian akan berdampak pada Menurunnya angka kejadian stunting di masyarakat. Dengan harapan agar di Tahun 2024, Lampung Selatan adapt mewujudkan penurunan angka prevalensi stunting dibawah 5%

#### D. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan

dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan Total RUP Rp. 973.168.679.766.melalui Penyedia sebesar Rp. 477 .578 .138. 518 (49,07%) dan melalui Swakelola sebesar Rp. 495.590.541.248 (50,93%) dengan nilai komitmen PDN (terhadap RUP melalui penyedia) sebesar Rp 450.413.177.002 (46,28%). \*Realisasi PDN terhadap komitmen sebesar Rp. 396.382.583.087,97 (88,00%) atau 82,99% terhadap RUP melalui penyedia atau 40,73 % terhadap Total RUP pengadaan (973 M). Ke depan pada tahun 2023 Lampung Selatan menargetkan realisasi PDN sebesar 481 M (52.79% %) terhadap Total RUP sebesar 912 M.

#### E. Pengendalian Inflasi

Angka inflasi menggambarkan rata-rata perubahan harga antar periode waktu tertentu dari sejumlah kelompok barang/jasa yang banyak menjadi kebutuhan masyarakat. Inflasi daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dicerminkan oleh inflasi Kalianda selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung stabil di angka 3 + 1, kecuali pada Tahun 2020 yang berada pada angka 1,93 persen, Laju inflasi Kalianda cenderung stabil di bawah angka 4 persen.

Pada Tahun 2021, inflasi Kalianda adalah sebesar 2,13 persen, lebih rendah dari inflasi Provinsi Lampung yang sebesar 2,19 persen, dan berada di atas inflasi nasional yang sebesar 1,87 persen. Pada Tahun 2022, laju inflasi Kalianda diharapkan tetap stabil di angka proyeksi 3 + 1 persen walaupun dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan global.

Pola sebaran data laju inflasi kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2021 menunjukkan adanya fluktuasi laju inflasi setiap tahun. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *gaussian* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan laju inflasi Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2023 berada pada rentang 2,07-3,68 persen.

#### Rencana Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

No	Tematik	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline	Target					Unit/Satuanj Kerja Pelaksana	
				2022	2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana	
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,14	12,5	12	11,50	11	Bappeda	PD terkait	
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Penanaman Modal	1,8	10	10	10	10	DPMPPTSP	PD terkait	
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Angka Stanting)	Menurunnya Angka Stanting	Angka Stanting	9,9	7,5	5	4,9	4,7	Bappeda	PD terkait	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Produk Dalam Negeri	39,30	60,25	85,25	85,75	87,25	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PD terkait	
5	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi	Meningkatnya Inflasi	5,52	5,23	5,00	4,96	4,93	Bagian Perekonomian	PD terkait	

## BAB IV

### MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

#### 4.1. Pelaksanaan RB

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Sasaran Reformasi Birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informatika dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif. Pengertian reformasi di sini merupakan proses pembaruan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, bukan upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Reformasi Birokrasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar hasilnya nanti berdampak positif terhadap pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Walaupun belum dilaksanakan dengan optimal, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan. Seperti prinsip keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai dari suatu kebijakan yang telah diputuskan.

#### 4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal. Dalam pelaksanaannya, Reformasi Birokrasi Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehingga monev Reformasi Birokrasi mikro harus komprehensif dikoordinasikan, antara general dan tematik (tidak silo). Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah. Hal lebih lanjut terkait monitoring dan evaluasi akan diatur dalam Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik secara berkala maka dibuat aplikasi Reformasi Birokrasi. Aplikasi tersebut sebagai alat bantu pengelolaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik agar data dapat terkelola dengan baik, bisa diakses oleh pemangku kebijakan, evaluator internal dan Kemenpan Reformasi Birokrasi selaku koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional.

### 4.3. Format Rencana Aksi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan RB

Format rencana aksi RB general dan tematik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

#### a. Rencana Aksi RB General dan RB Tematik

#### Rencana Aksi RB General Tahun....

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	1 Dokumen	Penyusunan Kelembagaan dan Sistem Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen Kelembagaan	-	25%	25%	50%	100%	131.379.100	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	dokumen	menyusun PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi pemerintah	Jumlah		50%	50%	-	-	100%	-	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2.4	Koordinasi dengan provinsi	Dok						3.25	250.231.800	Dinas Kominfo	
			Koordinasi dengan OPD	Dok									
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	10%	Membuat dan mengimplementasikan peta rencana dan arsitektur SPBE	Dok		-	-	-	-	-			
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	70%	Penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan dengan dokumen-dokumen lain yang terkait.	%	Persentase Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra	-	-	-	70%	0,7	589.297.300	Bappeda	Seluruh unit kerja
	Nilai SAKIP	66	Pemetaan sasaran RPJMD melalui cascading RPJMD untuk mendorong Perangkat Daerah berkontribusi terhadap ketercapaian sasaran RPJMD.	%	Persentase Perangkat Daerah dengan aktivitas program telah selaras dengan sasaran RPJMD.	-	-	-	70%	0,7	1.109.383.800		Seluruh unit kerja
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	100%	Penggunaan aplikasi perizinan dalam pemberian/pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah	Jumlah izin yang diterbitkan melalui aplikasi perizinan	0%	25%	50%	75%	75%	-	DPMPPTSP	Seluruh unit kerja

## Rencana Aksi RB Tematik Tahun....

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Setuan Kerja Pelaksana	
					Setuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordin ator	Pelaksana
Belum seluruhnya SDM pengelola PBJ memiliki sertifikat fungsional tertentu	Meningkatnya jumlah fungsional tertentu	Jumlah SDM PBJ yang telah memiliki Sertifikat Fungsional Tertentu	100%	Mengikuti uji kompetensi Fungsional Tertentu	Orang	Jumlah SDM UKPBJ yang mengikuti uji kompetensi	0	0	6	2	8	Tidak Terkait	100.000.000	BKD	UKPBJ
Belum adanya SDM yang berkompoten terkait TKDN	Meningkatnya kompetensi SDM terkait TKDN	Tersedianya SDM yang berkompoten terkait TKDN	2 Orang	Mengikuti DIKLAT TKDN	Orang	Jumlah SDM yang mengikuti DIKLAT TKDN	0	0	0	2	2	Tidak Terkait	46.000.000	Perinda E	Perinda E
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang Belum Matang	Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level Pro Aktif	Melakukan revisi pada level manajemen pengadaan sesuai arahan LKPP	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajemen Pengadaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ
				Mengumpulkan bukti dukung pada level Manajemen Penyedia	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajemen Penyedia	0	0	0	1	1	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ
				Melengkapi bukti dukung pada level Manajemen Kinerja	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajemen Kinerja	0	0	0	1	1	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ
				Mengupdate bukti dukung pada level Manajemen Risiko	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajemen Risiko	0	0	0	1	1	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ
				Meng-update data dukung level Pengorganisasian Kelembagaan	Kegiatan	Peningkatan Domain Pengorganisasian Kelembagaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ
				meng-update Tugas/Fungsi Kelembagaan	Kegiatan	Peningkatan Domain Tugas/Fungsi Kelembagaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ
				Meng-update Perencanaan SDM Pengadaan	Kegiatan	Peningkatan Domain Perencanaan SDM Pengadaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ
				Merevisi bukti dukung pada level Pengembangan SDM Pengadaan	Kegiatan	Peningkatan Domain ; Pengembangan SDM Pengadaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ
				Merevisi Sistem Informasi	Kegiatan	Peningkatan Domain Sistem Informasi	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	UKPBJ	UKPBJ	
Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) perlu ditingkatkan dan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Belanja Maksimal pada Belanja Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya RUP penggunaan produk dalam negeri (PDN)	% RUP barang/jasa dengan memprioritaskan target tagging produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi	100%	Pencapaian Penginapan Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SRUP dengan memprioritaskan target tagging produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi	Kegiatan	Pembinaan	100%	0	0	0	0	Tidak terkait		UPBJ	UPBJ
	Meningkatnya Belanja Pengadaan Barang/Jasa dengan metode e-Purchasing (Katalog)	% RUP barang/jasa dengan metode e-Purchasing (Katalog)	60%												



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : 21 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 16 juni 2023

RENCANA AKSI RB GENERAL PADA 21 INDIKATOR

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan Struktur Organisasi/transformatasi organisasi berbasis kerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	1 Dokumen	Penyesuaian Kelembagaan dan Sistem Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen Kelembagaan	-	25%	25%	50%	100%	131,379,100	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	dokumen	menyesuaikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi pemerintah	Jumlah	Jumlah Dokumen Sistem Kerja	50%	50%	-	-	100%	-	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2.4	Koordinasi dengan provinsi	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1	1	1	-	3	24,260,000	Dinas Kominfo	Seluruh Perangkat Daerah
			Koordinasi dengan OPD	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	-	-	1	-	1	16,846,500		
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	10%	Membuat dan mengimplementasikan peta rencana dan arsitektur SPBE	Dok		-	-	2	-	2	83,410,600		
pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	70%	Penyusunan dokumen perencanaan diselaraskan dengan dokumen-dokumen lain yang terkait.	%	Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra	-	-	-	70%	0.7	589,297,300		Seluruh unit kerja



Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
	Nilai SAKIP	66	Pemetaan sasaran RPJMD melalui cascading RPJMD untuk mendorong Perangkat Daerah berkontribusi terhadap ketercapaian sasaran RPJMD.	%	Persentase Perangkat Daerah dengan aktivitas program telah selaras dengan sasaran RPJMD.	-	-	-	70%	0.7	1,109,383,800	Bappeda	Seluruh unit kerja
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	100%	Penggunaan aplikasi perizinan dalam pemberian/pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah	Jumlah izin yang diterbitkan melalui aplikasi perizinan	0%	25%	50%	75%	75%	-	DMPPTSP	Seluruh unit kerja
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	WBK	Pencanangan Penetapan Unit Kerja Pembangunan Unit Kerja Pemantau Pembangunan ZI	Laporan	Hasil Evaluasi Menpanrb	25%	25%	25%	25%	100%	85,000,000	Inspektorat	Seluruh OPD
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan Kegiatan	Level SPIP	25%	25%	25%	25%	100%	28,980,000		Seluruh OPD
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	4 Dok	Memonitoring Hasil Opini dan Aspirasi Publik	Dok	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	1	1	1	4	9,756,000	Dinas Kominfo	Seluruh unit kerja
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	80	Sosialisasi SPI kepada pengguna Internal, External dan Expert	Nilai	Nilai SPI	-	-	80	-	80	34,601,800	Inspektorat	Seluruh unit kerja

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	50	Penyusunan laporan kebijakan yang berkualitas dilingkungan Perangkat Daerah Kab. Lam-sel	Persen	Jumlah Kebijakan yang berkualitas	-	-	25	25	50	-	1. Bagian Organisasi 2. Bagian Hukum 3. Sekretariat DPRD	Seluruh unit kerja
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	8	Penyusunan Produk Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah	Jumlah Peraturan Daerah	-	-	6	2	8	119,500,000	Bagian Hukum	OPD Pemerakasa Perda
		37		Jumlah	Jumlah Peraturan Bupati	10	18	9	-	37		Bagian Hukum	
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip		Penerapan Aplikasi Sri	OPD Bagian Kecamatan	Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Aplikasi Srikandi Secara Efektif	25%	25%	25%	25%	100%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75%	Verifikasi dan Fasilitasi Informasi data Statistik Sektoral	Persen	Data statistik sektoral daerah Kab. Lampung Selatan	48.83%	55.81%	65%	75%	75%	73,125,400	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			Efektivitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	%	Capaian pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik ( e-Procurement) dan SIRUP Kabupaten Lampung Selatan	20%	20%	20%	20%	80%	438,231,000	Bagian PBJ	Seluruh Unit Kerja

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50%	SDM yang Berkompeten dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	8	-	2	10	15,000,000	Bagian PBJ	Seluruh Unit Kerja
			Tingkat Kematangan PBJ	Dokumen	Jumlah Dokumen capaian variabel level kepematangan UKPBJ proaktif (level 3)	2	3	-	4	9	35,000,000		
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	a. Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah Tepat waktu	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah	-	-	9	6	15	-	BPKAD	Seluruh unit kerja
			b. Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bulan	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib, transparan dan Akuntabel	3	3	3	3	12	-		Seluruh unit kerja
			c. Koordinasi dan Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dengan seluruh Perangkat Daerah yang didamping oleh Tenaga Ahli Keuangan	Laporan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	1	-	-	-	1	-		Seluruh unit kerja

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
			d. Peningkatan penatausahaan BMD dan koordinasi terkait BMD baik diseluruh Perangkat Daerah maupun Instansi vertikal	Persentase	Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	25%	25%	25%	25%	100%	-	BPKAD	Seluruh unit kerja
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	WTP	Mempercepat progress capaian Tindak Lanjut atas Temuan BPK di tahun-tahun sebelumnya. Melakukan perbaikan agar tidak terjadi temuan berulang	100%	Terselesainya Tindak Lanjut atas Temuan BPK tahun 2022	25%	25%	25%	25%	100%	85,000,000	Inspektorat	Seluruh unit kerja
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	80%	a. Memetakan seluruh pegawai yang belum di angkat menjadi jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya dan pendidikannya	Persen	Jumlah hasil pemetaan pegawai yang belum di angkat menjadi jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya dan pendidikannya	20%	20%	20%	20%	80%	-	1. BKD 2. Bagian Organisasi	Seluruh unit kerja
			b. Membuat pemetaan pengembangan karir jabatan fungsional	Persen	Jumlah hasil pemetaan pengembangan karir jabatan fungsional	-	20%	20%	20%	60%	-		Seluruh unit kerja
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	70%	a. Membuat regulasi pelaksanaan manajemen talenta pegawai	dokumen	Peraturan Kepala Daerah tentang manajemen talenta	-	-	-	1	1	-		Seluruh unit kerja

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
			b. Menerapkan manajemen talenta dengan melakukan pemetaan terhadap pegawai	dokumen	Dokumen hasil pemetaan pegawai dari hasil manajemen talenta	-	-	-	1	1	-	BKD	Seluruh unit kerja
			Optimalisasi penerapan Manajemen ASN berbasis sistem merit	dokumen	Dokumen hasil pemetaan pegawai dari hasil manajemen talenta sebagai dasar penguatan sistem merit	-	-	-	1	1	-		Seluruh unit kerja
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	80%	Sosialisasi tata cara penilaian kinerja individu melalui e-kinerja	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi tata cara penilaian kinerja individu melalui e-kinerja diseluruh OPD	-	-	-	1	1	115,000,000		BKD
			Penilaian Kinerja dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja dan pengembangan karir pegawai	dokumen	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai	-	-	-	1	1			
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	100 poin	Coaching klinik dengan Kementerian PAN-RB	Kegiatan	Peningkatan pemahaman tim pengelola sistem merit	-	-	-	1	1	-	BKD	
			Meningkatnya nilai indeks sistem merit di Kabupaten Lampung Selatan	indeks	Memperoleh nilai poin yang meningkat	-	-	-	100	100	-		

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	dokumen	Meningkatkan Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah	Penerapan Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	50%	50%	-	-	100%	Bagian Organisasi	Seluruh unit kerja
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	dokumen	Peningkatan hasil SKM pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	50%	50%	-	-	100%	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan
	Indeks Pelayanan Publik	dokumen	Peningkatan hasil Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah	Koordinasi Pelayanan Publik pada penyelenggaraan layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	-	-	50%	50%	100%		
	Tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Dokumen	Peningkatan hasil standar pelayanan publik	Jumlah	Koordinasi laporan pelayanan publik	-	-	50%	50%	100%	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan

**RENCANA AKSI RB TEMATIK PENGENDALIAN INFLASI  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Tema : Pengendalian Inflasi															
Belum adanya kerjasama antar daerah terkait pemenuhan pangan	Terwujudnya kerjasama antar daerah terkait pemenuhan pangan	Jumlah Kerjasama	1 Mou	Melakukan kerja sama antar daerah untuk memenuhi ketersediaan pangan	Daerah	Jumlah daerah yang dilakukan kerja sama	0	0	0	1	1	Terkait	tida ada anggaran	DKP & Bag. Perekonomian	PD Terkait
Tidak stabilnya harga bahan pokok	Harga bahan pokok yang terjangkau	Jumlah Terselenggaraan operasi pasar	13 keg	Melaksanakan operasi pasar murah	Keg	Operasi pasar yang dilakukan	7	0	6	0	13	Terkait	180,000,000	Bag Perekonomian	Disdagprin dan DKP
		Jumlah Terselenggaraan gelar pangan murah	1 keg	Melaksanakan Gelar Pangan Murah	Keg	Gelar Pangan Murah yang dilakukan	0	1	0	0	1	Terkait	53,121,100	Bag Perekonomian	DKP
Masih kurangnya gudang penyimpanan lumbung pangan	Tersedianya gudang penyimpanan lumbung pangan didesa	Jumlah gudang penyimpanan didesa	3 gudang	Mengajukan proposal ke BAPANAS	Proposal	Jumlah proposal yang diajukan	0	0	0	3	3	Terkait	tida ada anggaran	DKP	DKP
Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan konsumsi bahan pangan substitusi/non-beras	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait konsumsi bahan pangan substitusi/non-beras	Jumlah kegiatan sosialisasi	11 Sekolah	Melakukan sosialisasi konsumsi bahan pangan substitusi/non-beras kepada anak SD	Keg	Jumlah kegiatan sosialisasi	0	2	5	4	11	Terkait	44,976,700	DKP	DKP
		Jumlah Kelompok yang menerima bibit benih	7 Kelompok	memberikan bantuan bibit atau benih tanaman ke Kelompok Wanita Tani	Kelompok	Jumlah Kelompok	0	0	0	7	7	Terkait	138,961,800	DKP	DKP

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Tema : Pengendalian Inflasi															
		Jumlah kelompok yang menerima pelatihan	3 Kelompok	memberikan pelatihan pengolahan pangan lokal	Kelompok	Jumlah kelompok	0	2	1	0	3	Terkait	20,019,500	DKP	DKP
Belum adanya aplikasi pemantauan harga	Tersedianya aplikasi pemantauan harga	Aplikasi pemantauan harga	1 Aplikasi	Membuat aplikasi pemantauan harga	Aplikasi	Jumlah Aplikasi	0	0	0	1	1	Terkait	tida ada anggaran	Disdagprin	Disdagprin
Masih rendahnya produksi pertanian perikanan dan peternakan	Meningkatnya penggunaan teknologi pertanian, peternakan, perikanan	Jumlah peralatan yang dibagikan	15 alat	Pembagian alat corn sheller (pemipil jagung), cultivator (alat pencacah tanah), hand tractor (alat pengolah tanah), combine harvester (alat panen padi)	alat	Jumlah alat	-	4	-	-	-	Terkait	120,000,000	TPH Bun	TPH Bun
Masih rendahnya Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi pangan dan perdagangan yang berkualitas	Tercapainya Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi pangan dan perdagangan yang berkualitas	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran dan perbaikan	1950 Km	Melakukan pelebaran jalan	Km	Panjang jalan	0	0	1000 Km	950 Km	1950 Km	Terkait	1,206,975,000	PUPR	PUPR
			21518 Km	Melakukan perbaikan jalan	Km	Panjang jalan	0	0	10759	10759	21518 Km	Terkait	127,088,478,258	PUPR	PUPR
Kurangnya Tingkat Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Menurunnya Tingkat Inflasi daerah	Peningkatan Produksi	Meningkatkan kualitas Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Paket	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun			13		13	terkait	1,300,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat StokertHolder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unity/Satuan Kerja Pelaksana		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
Tema : Pengendalian Inflasi																
			Meningkatkan Jumlah Intensitas penanaman pertahun	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Jumlah Sumur Bor yang Dibangun					6	6	terkait	810,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Meningkatkan Jumlah Intensitas penanaman pertahun	Penyediaan alsintan berupa cultivator yang diserahkan kepada petani masyarakat	Unit	Jumlah alsintan berupa cultivator yang diserahkan kepada petani hortikultura		25				25	terkait	329,600,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Meningkatkan Luas areal penanaman sebesar 0.5 ha	Pengembangan Kawasan Bawang Merah	ha	Jumlah Areal Pertanian yang dikembangkan		0.5				0.5	terkait	38,813,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Meningkatkan Luas areal penanaman sebesar 0.5 ha	Pengembangan Kawasan Cabai	ha	Jumlah Areal Pertanian yang dikembangkan		0.5				0.5	terkait	27,512,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan	Pembangunan Dryer	Unit	Jumlah bangunan Dryer yang dibangun					2	2	terkait	393,300,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan	Pembangunan Rice Milling Unit (RMU)	Unit	Jumlah bangunan Rice Milling Unit (RMU) yang dibangun					2	2	terkait	183,384,900	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Tema : Pengendalian Inflasi															
			Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan	Cadangan Benih Daerah untuk Bencana	Kg	Jumlah bantuan benih yang diberikan				1,750	1750	terkait	24,675,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
harga komoditas pangan di tingkat konsumen seringkali mengalami kenaikan harga	Masyarakat berpenghasilan rendah	Terlaksananya Gelar Pangan Murah (GPM)	34 kali	Pelaksanaan Gelar Pangan Murah	kali	Gelar Pangan Murah	10	7	10	7	34	Terkait	50,996,100	Dinas Perdagangan Kab. Lampung Selatan	Dinas Ketahanan Pangan kab. Lampung Selatan
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Hibah Barang Berupa Atraktor Cumi	2 Paket Bantuan Hibah Barang Berupa Atraktor Cumi			2 Paket		2 Paket	Terkait	150,000,000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Belanja Bibit/ Benih Ikan Untuk Restocking Perairan Umum Di lampung Selatan	3 Paket Belanja Bibit/ Benih Ikan Untuk Restocking Perairan Umum Di lampung Selatan			3 Paket		3 Paket	Terkait	56,100,000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Paket Kapal Penangkap Ikan yntuk Perairan Laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan dan sarana pendukung penangkapan ikan	13 Paket Kapal Penangkap Ikan yntuk Perairan Laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan dan sarana pendukung penangkapan ikan			13 Paket		13 Paket	Terkat	1,254,500,000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
Tema : Pengendalian Inflasi																
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih untuk Mendukung Produksi Perikanan)	Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih untuk Mendukung Produksi Perikanan)					1 Paket	1 Paket	Terkait	641,859,400	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				Kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bantuan Paket Benih Ikan Lele dan Pakan	6 Paket Benih Ikan Lele dan Pakan		6 paket				6 paket	Terkait	30,600,000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				Kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	BantuanPaket sarana dan prasarana Budidaya Udang Vaname Sistem Kolam Bundar	1 Paket sarana dan prasarana Budidaya Udang Vaname Sistem Kolam Bundar			1 Paket			1 Paket	Terkait	60,000,000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				Kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bantuan Paket Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember)	19 Paket Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember)					19 Paket	19 Paket	Terkait	20,000,000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				Kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bantuan Paket Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau	3 Paket Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau					3 Paket	3 Paket	Terkait	195,072,000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
Tema : Pengendalian Inflasi																
				Kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bantuan Paket Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar	8 Paket Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar					8 Paket	8 Paket	Terkait	440,000,000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				Kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bantuan Paket Benih Ikan Gurame dan Pakan	5 Paket Benih Ikan Gurame dan Pakan		5 Paket				5 Paket	Terkait	35,250,000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				Kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bantuan Paket Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Arwana	1 Paket Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Arwana					1 paket	1 paket	Terkait	1,000,000,000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Beku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Bantuan Paket Hibah Bedah Unit Pengolahan (UPI) Skala Mikro Kecil (Perbaikan Bangunan Beserta Peralatan Pendukung)	5 Paket Hibah Bedah Unit Pengolahan (UPI) Skala Mikro Kecil (Perbaikan Bangunan Beserta Peralatan Pendukung)					5 Paket	5 Paket	Terkait	1,000,000,000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Rendahnya kompetensi SDM terkait pemantauan harga bahan pokok	Tersedianya SDM yang berkompeten	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	1 keg	Mengikuti Diklat pemantauan harga bahan pokok	Orang	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	0	0	0		1	1	Tidak Terkait	10,000,000	BKD	Disdagprin

**RENCANA AKSI RB TEMATIK PENINGKATAN REALISASI INVESTASI  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Tema : Peningkatan Investasi															
Belum adanya regulasi terkait Peta Potensi Investasi Daerah	Terwujudnya Peta Potensi Investasi Daerah	Jumlah Regulasi	1 Regulasi	Menyusun Regulasi terkait peta potensi investasi daerah	Dokumen	Jumlah regulasi yang ditetapkan	-	-	-	1	1	Terkait	Tida ada Anggarannya	DPMPPTSP	DPMPPTSP
Belum semua peta potensi daerah ada dalam aplikasi	Terwujudnya informasi Peta Potensi Investasi Daerah	Jumlah Data	16 Data Potensi Investasi Daerah	Mengumpulkan informasi peta potensi investasi daerah ke dalam aplikasi	Data	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang di input	-	1	-	-	1	Terkait	Tida ada Anggarannya	DPMPPTSP	DPMPPTSP
Belum optimalnya regulasi terkait Iklim Investasi yang kondusif sesuai dengan tata ruang wilayah	Terciptanya Regulasi terkait Iklim Investasi yang kondusif sesuai dengan tata ruang wilayah	Jumlah Regulasi	2 Regulasi	Revisi regulasi terkait Iklim Investasi yang kondusif sesuai dengan tata ruang wilayah	Dokumen	Jumlah dokumen regulasi terkait Iklim Investasi sesuai dengan tata ruang wilayah	-	-	-	1	1	Tidak Terkait	Tida ada Anggarannya	PUPR	PUPR
				Menetapkan Regulasi batas wilayah Kecamatan dan Desa	Dokumen	Jumlah dokumen penetapan batas wilayah	-	-	-	1	1	Tidak Terkait	Tida ada Anggarannya	Bag. Tapem & DPMD	Bag. Tapem & DPMD
Masih kurangnya pemahaman pelaku IKM/UMKM tentang Perizinan OSS	Meningkatnya pelaku IKM/UMKM yang telah mendaftarkan perizinan OSS	Jumlah pelaku IKM/UMKM	355 pelaku usaha	Sosialisasi tentang perizinan OSS	Kegiatan	Jumlah Sosialisasi tentang perizinan OSS	-	-	-	1	1	Terkait	Tida ada Anggarannya	DPMPPTSP	Disdagperin & Diskop UMKM
Rendahnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Jumlah SDM yang berkompeten dalam pelayanan perizinan	1 Kegiatan	Mengikuti Diklat kompetensi terkait pelayanan perizinan	Kegiatan	Jumlah kegiatan Diklat kompetensi terkait pelayanan perizinan	-	-	-	1	1	Tidak Terkait	10,000,000	DPMPPTSP	DPMPPTSP
Masih rendahnya Reward & Punishment	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Jumlah SDM Reward & Punishment	1 Orang	Memberikan Reward & Punishment kepada Pegawai penyelenggaraan perizinan	Orang	Jumlah Orang yang menerima Reward & Punishment	-	-	-	1	1	Tidak Terkait	Tida ada Anggarannya	DPMPPTSP	DPMPPTSP
Belum optimalnya potensi pendapatan daerah	Meningkatnya potensi pendapatan daerah	Persentase pendapatan daerah	13%	Pembayaran pajak melalui QRIS	%	Persentase Pembayaran pajak melalui QRIS	-	-	-	5%	5%	Terkait	100,000,000	BPPRD	BPPRD

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Tema : Peningkatan Investasi															
Masih Rendahnya Kepatuhan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh pelaku usaha	Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh pelaku usaha	Jumlah kegiatan monev	14 Kecamatan	Monitoring dan Evaluasi terkait kelengkapan penanaman modal	Kegiatan	14 Kegiatan Money	3	3	4	4	14	Terkait	141,500,000	DMPPTSP	DMPPTSP
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi	220 pelaku usaha	Sosialisasi tentang laporan kegiatan penanaman modal	Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi		73	73	74	220	Terkait	200,000,000		

**Rencana Aksi RB Tematik P3DN**

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeh older utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
					Satuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana		
Tema : P3DN																	
Belum seluruhnya SDM pengelola PBJ memiliki sertifikat fungsional tertentu	Meningkatnya jumlah fungsional tertentu	Jumlah SDM PBJ yang telah memiliki Sertifikat Fungsional Tertentu	800%	Mengikuti uji kompetensi Fungsional Tertentu	Orang	Jumlah SDM UKPBJ yang mengikuti uji kompetensi	0	0	6	2	8	Tidak Terkait	100,000,000	BKD	UKPBJ		
Belum adanya SDM yang berkompeten terkait TKDN	Meningkatnya kompetensi SDM terkait TKDN	Tersedianya SDM yang berkompeten terkait TKDN	2 Orang	Mengikuti DIKLAT TKDN	Orang	Jumlah SDM yang mengikuti DIKLAT TKDN	0	0	0	2	2	Tidak Terkait	46,000,000	Perindag	Perindag		
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang Belum Matang	Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level Pro Aktif	Melakukan revisi pada level manajemen pengadaan sesuai arahan LKPP	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajemen Pengadaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ		
				Mengumpulkan bukti dukung pada level Manajemen Penyedia	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajernn Penyedia	0	0	0	1	1	Tidak Terkait				UKPBJ	UKPBJ
				Melengkapi bukti dukung pada level Manajemen Kinerja	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajemen Kinerja	0	0	0	1	1	Tidak Terkait				UKPBJ	UKPBJ
				Mengupdate bukti dukung pada level Manajemen Risiko	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajemen Risiko	0	0	0	1	1	Tidak Terkait				UKPBJ	UKPBJ
				Meng-update data dukung level Pengorganisasian Kelembagaan	Kegiatan	Peningkatan Domain Pengorganisasian Kelembagaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait				UKPBJ	UKPBJ





Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
Tema : P3DN															
Masih rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi TKDN IK	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi TKDN - IK	Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi TKDN- IK	60 IKN	Optimalisasi sosialisasi dan pendampingan terkait pemahaman proses sertifikasi TKDN- IK	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti sosialisasi	0	0	100	60	160	Terkait	25,000,000	Perindag	Perindag dan UKPBJ
Masih rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terkait e-purchasing Pelaku usaha UMKM	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait e-purchasing Pelaku usaha UMKM	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi	100 Pelaku Usaha	Optimalisasi sosialisasi dan pendampingan terkait e-purchasing Pelaku usaha UMKM	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	0	0	0	100	100	Terkait	25,000,000	Perindag	Perindag dan UKPBJ
Belum optimalnya regulasi daerah terkait P3DN dan UMKM	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi TKDN - IK	Jumlah regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	1 Regulasi	Penerbitan regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	Dokumen	Jumlah Regulasi daerah	0	0	0	1	1	Terkait	tidak ada anggarannya	UPBJ	Tim P3DN
Barang/jasa Produk Dalam Negeri (PDN) yang dibutuhkan belum dipenuhi oleh penyedia	Tersedianya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan	% barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi	Realisasi Penggunaan Barang/Jasa PDN 60%	Melakukan business matching antara UKPBJ, OPD, dan dengan pelaku usaha (penyedia)	Kegiatan	Kegiatan bussiness matching	0	0	0	1	1	Terkait	tidak ada anggarannya	UPBJ	Tim P3DN
				Membuat MoU dengan Perusahaan Swata/BUMN/BUMD untuk mendukung program P3DN di Kab.Lam-Sel	MoU	Pelaksanaan MOU dengan pelaku usaha dan UMKM	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	tidak ada anggarannya	Perindag & Bag Kerjasama	Tim P3DN dan Stakeholder Terkait
				Melakukan monev harga dan aktifitas penyedia di e-katalog	Kegiatan	Pelaksanaan Monev	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	tidak ada anggarannya	UPBJ	Tim P3DN

**RENCANA AKSI RB TEMATIK DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING)  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kategori	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
Peningkatan dan pemantauan D	Terwujudnya 1 data penanganan stunting yang terintegrasi	Data yang terintegrasi	100%	Terlaksananya Pemetaan kebutuhan perangkat pendukung Sistem Informas	Laporan	Jumlah laporan hasil pemetaan kebutuhan perangkat pendukung Sistem Informasi	0	0	0	1	1	Terkait	300,000,000	Kominfo	Tim TPPS Kab.Lam-Sel
				Terlaksananya Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi	%	% Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan	1	1	1	1	1				
Penyediaan	Tersedianya Standar Operasional Prosedur / Proses Bisnis Penanganan Stunting secara menyeluruh dan Terintegrasi	Operasional Prosedur / Proses Bisnis	1 SOP	Menyusun SOP Audit Kasuk Stunting dalam rangka penanganan Stunting	SOP/KAK/TOR	Jumlah SOP	0	1	0	0	1	Terkait	Tidak ada biaya	Dalduk KB	Tim TPPS Kab.Lam-Sel
Penyediaan alat skrining	Tersedianya anggaran untuk alat skrining rematri hemoglobin remaja putri kelas 7 dan 10	jumlah anggaran yang tersedia untuk kebutuhan pengadaan alat skrining	100%	Penyusunan anggaran untuk kebutuhan alat skrining-Hbkit	Unit	Jumlah alat skrining Hbkit	3000	3000	3000	3225	12225	Tidak terkait	149,458,312	Dinas Kesehatan	28 Puskesmas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
Terbatasnya kompetensi pendamping Capus dan Catin	Terlaksananya peningkatan kapasitas kompetensi pendamping	Persentase pendamping yang ditingkatkan kompetensinya	100%	Melakukan DIKLAT dan Monev terkait pendamping Capus dan Catin	Laporan	Jumlah DIKLAT dan Monev	-	-	1	1	2	Tidak terkait	Tidak ada anggaran	Daldu KB	Dinas Terkait
Masih tingginya angka unmed need yaitu 10,76%	Terwujudnya pemahaman masyarakat akan pentingnya KB	persentase Menurunnya unmed need	10,45%	Meningkatkan sosialisasi terkait unmed need dan melakukan pelayanan KB bergerak	Laporan	Jumlah sosialisasi dan pelayanan KB	1	2	sosialisasi (17 Kecamatan)	-	3 kegiatan KB bergerak dan Sosialisasi di 17 Kecamatan	Terkait	242,820,200	Daldu KB	Puskesmas dan PLKB
Masih tingginya prevalensi stunting	Gerakan Swasembada Gizi	Terwujudnya penurunan persentase prevalensi stunting dibawah standar nasional	14.9	Melakukan layanan kesehatan ibu dan anak	%	1. Persentase ibu hamil yang kekurangan energi kronis mendapat tambahan asupan zat gizi	24,50%	24,50%	24,50%	24,50%	98%	Terkait	831,566,250	Dinas Kesehatan	Puskesmas
					%	2. Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	24,75%	24,75%	24,75%	24,75%	99%	Terkait	49,195,600	Dinas Kesehatan	Puskesmas
					%	3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	48%	-	48%	-	96%	Terkait	Tidak ada anggaran	Dinas Kesehatan	Puskesmas

Masalah	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
					%	4. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	303,790,000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
				Melakukan layanan konseling gizi	%	1. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	Tidak ada anggaran	Dinas Dalduk KB	PKB
					%	2. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	1,066,800,000	Dinas Sosial	Pelaksana Pendamping PKH
					%	3. Cakupan keluarga beresiko Stunting yang memperoleh pendampingan	-	20%	20%	20%	60%	Terkait	4,699,800,000	Dinas Dalduk KB	TPK

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
					%	4. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	terkait dengan tugas pendampingan	Dinas Dalduk KB	
				Melakukan layanan sanitasi dan air bersih	160 SR	1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	-	-	25%	75%	100%	Terkait	1,000,000,000	Dinas PUPR	Swakelola Pokmas/KSM
					582 SR	2. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	-	-	80%	20%	100%	Terkait	2,800,000,000	Dinas PUPR	kontraktual
				Melakukan layanan Paud	%	1. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota	-	-	20%	50%	70%	Terkait	166,345,200	Dinas Pendidikan	Dinas terkait

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
					%	2. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	-	-	-	25%	25%	Terkait	12,297,200	Dinas Pendidikan	Dinas terkait
				Melakukan layanan sosial	%	1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	15%	15%	15%	15%	60%	Terkait	APBN	Dinas Sosial	
					%	2. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai	15%	15%	15%	15%	60%	Terkait	APBN	Dinas Sosial	
					%	3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan	10%	10%	10%	10%	40%	Terkait	APBN	Dinas Sosial	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder primer utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4			Total	Koordinator
					Bantuan	4. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan	521962 APBN	528384 APBN	538588 APBN			147,785,750,000 APBN	Dinas Sosial	
					Bantuan	5. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	50.839	50,741				74,910,825,000 APBN	Dinas Sosial	
					Bantuan	6. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	97.687	99.710				39,472,400,000 APBN	Dinas Sosial	

**RENCANA AKSI RB TEMATIK KEMISKINAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/ stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
<b>Kemiskinan</b>															
P3KE yang ada 100% valid	Tersedianya data base pengentasan kemiskinan yang terpadu	1 data terpadu by nam by adress by NIK	100%	1 Melakukan verifikasi dan validasi data P3KE	Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah melakukan verifikasi dan validasi data P3KE	60	60	60	80	260	Terkait	100,000,000	Bappeda	Masing-Masing Kecamatan
semua OPD gunakan data untuk basis data an ggulangan kinan	Terwujudnya peta proses bisnis yang terpadu	Tersedianya probis terpadu	1 Dokumen	2 Pemanfaatan data dalam program kegiatan pengentasan kemiskinan	PD	Jumlah PD yang memanfaatkan data P3KE	15	15	15	15	15	Tidak terkait	25,000,000	Bappeda	15 PD yang memanfaatkan data P3KE
ada anggaran verifikasi dan si data P3KE	Tersusunnya perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan yang efektif dan efisien	Keselarasan perencanaan dan penganggaran	100%	3 Melakukan verifikasi dan validasi data P3KE tingkat desa melalui APBDES	DESA	Jumlah desa yang melakukan verifikasi dan Validasi data P3K	60	60	60	76	256	Terkait	-	Bappeda	Bappeda, Kec dan Kel
ada anggaran verifikasi dan si data P3KE				4 Menyusun dokumen rencana aksi tahunan (RAT) Kemiskinan	Dokumen	Jumlah Dokumen RAT Kemiskinan	1	-	-	-	1	Terkait	25,000,000	PMD	Desa
batasan anggaran kegiatan ggulangan kinan				5 Menyusun laporan triwulanan pelaksanaan program kegiatan pengentasan kemiskinan	Laporan	Jumlah laporan triwulanan kemiskinan	1	1	1	1	4	Terkait	-	Bappeda	PD pengampu pelaksana pengentasan kemiskinan



Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/ stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
a. Kemiskinan																
				6 Menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	Rp	Jumlah laporan Kemiskinan daerah	-	1	-	1	1	Terkait	25,000,000	Bappeda	PD pengampu pelaksana pengentasan kemiskinan	
b. Adanya permasalahan dalam pengawasan program pengentasan kemiskinan	Turunnya jumlah pelanggaran	Jumlah pelanggaran	0	Melakukan MONEV program pengentasan kemiskinan	PD	PD yang dilakukan Monev	15	15	15	15	15	Tidak terkait	100,000,000	Inspektorat	Inspektorat	
	Terwujudnya profesionalitas Aparatur	Indeks Profesionalitas	90%	Workshop program kegiatan pengentasan kemiskinan kepada Aparatur Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan	Teraksananya Workshop Kegiatan pengentasan kemiskinan	0	0	2	2	4	Tidak terkait	100,000,000	Bappeda	Bappeda	
c. Adanya inovasi dalam pengentasan kemiskinan	Pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang efektif, efisien dan tepat sasaran	Ketepatan program pengentasan kemiskinan	100%	Gerakan Sehari Seribu (Geserbu) : Sedekah dari ASN Kab. Lampung Selatan untuk Bedah Rumah masyarakat miskin	PD	Perangkat daerah yang melaksanakan Geserbu	0	0	36	36	36	Tidak terkait	tida ada anggaran	Perkim	Seluruh PD	
							4	4	4	7	7	terkait	5,000,000,000	DALDUK KB DAN KESEHATAN	DALDUK KB, PENDIDIKAN, KESEHATAN DST.	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/ stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/ stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana
Permasalahan: Kemiskinan															
Permasalahan: Tidak adanya aplikasi pendukung yang membantu pengentasan kemiskinan				Pengembangan Aplikasi cek Bantuan Langsung Kemiskinan secara Online dan Pemutakhiran Data Mandiri (Si BangKodir)	Aplikasi	Tersedianya Aplikasi (Si BangKodir)	0	0	0	1	1	Terkait	350,000,000	Bappeda	Bappeda

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

## BAB V PENUTUP

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023-2026, merupakan rencana rinci atas misi kelima Bupati Lampung Selatan, yaitu: Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik yang Profesional, Transfaran, Efektif dan Akuntabel, serta masuk pada tujuan Membangun Tata kelola pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif dan Transfaran.

Perlunya disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Dokumen ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tersebut. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO